

ABSTRAK

Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata mengatur bahwa pemutusan perjanjian akibat wanprestasi pada prinsipnya harus dilakukan melalui putusan pengadilan, sementara praktik pengadaan barang/jasa pemerintah yang umumnya berbentuk perjanjian baku kerap memuat klausul penyimpangan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang memungkinkan pemutusan kontrak tanpa melalui proses pengadilan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keabsahan klausul penyimpangan serta akibat hukumnya terhadap hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausul penyimpangan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yang memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul penyimpangan dapat dibenarkan sebagai wujud kebebasan berkontrak dan efisiensi pengadaan, tetapi tetap bergantung pada penilaian hakim. Klausul penyimpangan juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi pihak penyedia. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Kata Kunci: Pasal 1266 KUH Perdata, Pasal 1267 KUH Perdata, Klausul Penyimpangan, Perjanjian, Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRACT

Articles 1266 and 1267 of the Civil Code stipulate that the termination of an agreement due to default must in principle be carried out through a court decision, while the practice of procurement of government goods/services, which is generally in the form of a standard agreement, often contains a deviation clause in Articles 1266 and 1267 of the Civil Code that allows the termination of a contract without going through a court process. This condition raises questions about the validity of the deviation clause and its legal consequences on the rights and obligations of the parties. This study aims to analyze the validity of the deviation clause of Articles 1266 and 1267 of the Civil Code in government goods/services procurement agreements and examine the legal consequences caused. This research uses a doctrinal approach method that views law as a set of written norms. The results show that deviation clauses can be justified as a form of freedom of contract and procurement efficiency, but still depend on the judge's judgment. The deviation clause also has the potential to cause injustice, especially for the provider. Therefore, clarity of the arrangement is needed to ensure legal certainty and protection for the parties.

Keywords: *Articles 1266 of the Civil Code, Articles 1267 of the Civil Code, Deviation Clauses, Agreements, Procurement of Goods/Services.*